



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**ISNANI RASYIDI
NIM. 11727100909**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1442 H/2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat
Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di
Kecamatan Pangkalan Kerinci” yang ditulis oleh:

Nama : ISNAN RASYIDI
NIM : 11727100909
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru; 14 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Muslim S.Ag S.H, M. Hum
NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MUNURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LANGKALAN KERINCI*) yang ditulis oleh :

Nama : **ISNAN RASYIDI**
 NIM : 11727100909
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Juni Alizon, SH., MH

Penguji I
Nurhidayat, SH., MH

Penguji II
Safrinaldi, SH., MH



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

ABSTRAK

Satuan Perlindungan Masyarakat atau disebut dengan Satlinmas merupakan Organisasi Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Satlinmas sendiri berada dibawah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja pertahun 2004 dimana tugas Satlinmas mejalankan Membantu Ketertiban Daerah yang berada pada naungan Satpol PP yang sesuai dengan asas otonomi daerah dimana keamanan daerah diselenggarakan sendiri sesuai dengan Rumah Tangga Daerahnya masing-masing. Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci”.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pengendalian dan operasi terhadap kasus yang menyebabkan terjadinya ketertiban masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dan Apakah faktor penghambat untuk mendapatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pengendalian dan operasi terhadap kasus kerusuhan atau kasus yang menyebabkan terjadinya ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci, serta mengetahui faktor penghambat untuk mendapatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Metode penelitian skripsi ini yaitu hukum sosiologis dengan melakukan penelitian dilapangan dengan mewawancarai yaitu Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Linmas, Serta Anggota Linmas. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang diuraikan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Pengambilan sampel ini adalah *Purposive Sampling* dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu untuk mewakili.

Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci belum terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor penghambat untuk mendapatkan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, terbatasnya penyelenggaraan anggaran dana kepada anggota Satlinmas, kurangnya pendidikan dan pelatihan kepada anggota Satlinmas.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Perlindungan, Masyarakat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.WB

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmad dan karunia-Nya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan waktu yang di jadwalkan. Sholawat beriring salam terucap kepada junjungan alam yakni Rasulullah SAW, yang telah membawa manusia ke zaman yang penuh ilmu teknologi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagi pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih banyak kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Taswir dan Ibu Zetrawilis, serta Kakak Adriana Zetania dan Adek Rizky Febrian yang telah memberikan motivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih Bapak dan Ibu atas do'a restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab. M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Muslim S.Ag. SH. M.Hum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Muslim S.Ag. SH. M.Hum sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. H. Helmi Basri Lc. M.A selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalankan proses perkuliahan.
 7. Seluruh Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau terkhususnya prodi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada Abang Endriyanto, SH yang telah memberikan masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
 9. Kepada kawan-kawan kelas IH D dan HTN E, serta kawan-kawan seangkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
 10. Kepada kawan-kawan Tim KKN-DR Kecamatan Pangkalan Kerinci yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
 11. Kepada M. Nanda Kusuma, Jefri Hadi, Hasnan Muklis, M. Rizky Maulana, Robi Wahyudi Risky teman satu diskusi yang memberikan ilmu-ilmu baru.
- Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik.



Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambahkan khasanah

ilmu pengetahuan. Aamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 03 Juli 2021

Penulis

ISNAN RASYIDI
NIM. 11727100909



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II GAMBARAN UMUM	22
A. Sejarah Kecamatan Pangkalan Kerinci	22
B. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	27
C. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.....	28
D. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	30
E. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	31
BAB III TINJAUAN UMUM.....	38
A. Teori Pemberdayaan	38
B. Teori Kebijakan Publik	43
C. Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat	48
D. Teori Keamanan Dalam Masyarakat.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Pengendalian Operasi Terhadap Kasus Kerusakan Atau Kasus	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Menyebabkan Terjadinya Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014.....	58
B. Faktor Penghambat Untuk Mendapatkan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014.....	62

BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

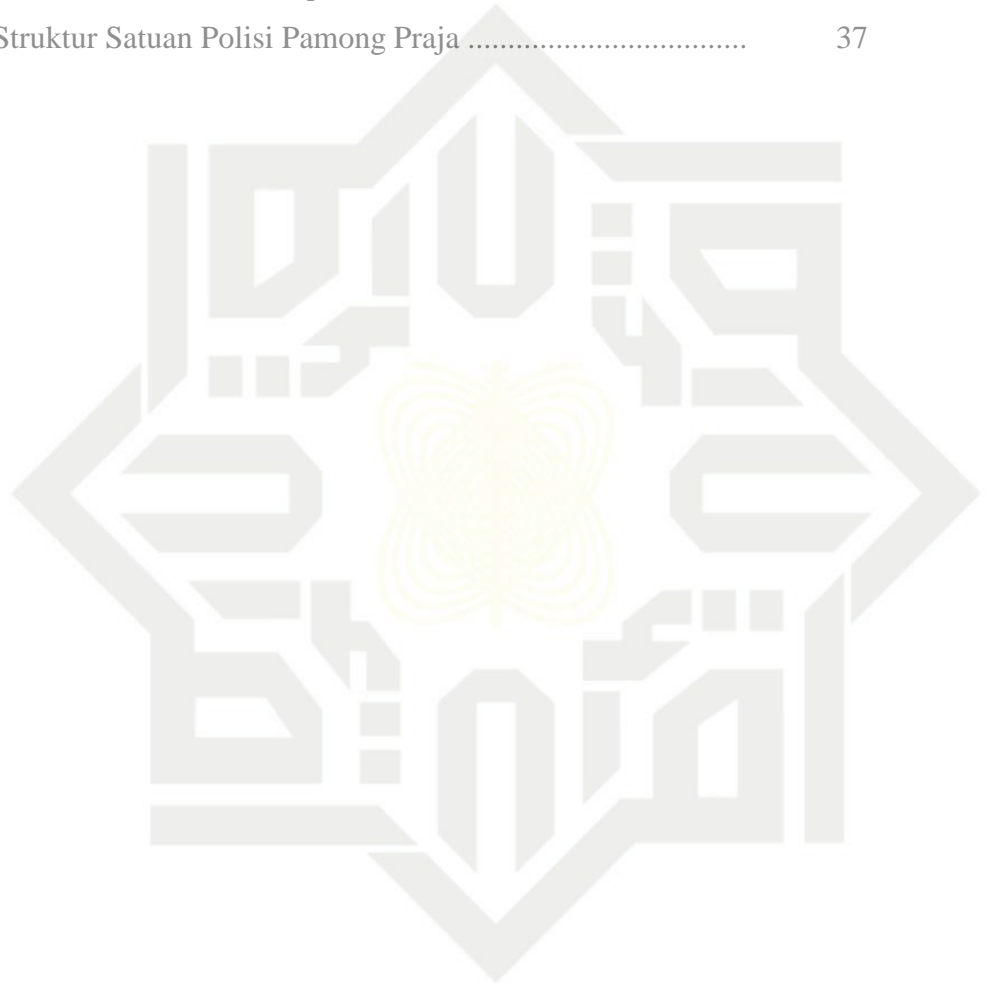


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Populasi dan Sampel	17
Tabel II.1 : Jarak Tempuh Ibukota Kabupaten Pelalawan Ke Ibukota Kecamatan Dalam Kabupaten Pelalawam	24
Tabel II.2 : Struktur Satuan Polisi Pamong Praja	37



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Sebagai perwujudan Tujuan dari Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia, maka disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakatnya dalam hal ini tenaga kerja di Indonesia pada Undang-Undang ini terdapat peran penting tenaga kerja dalam pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan didalamnya juga terdapat upaya perlindungan tenaga kerja.¹ Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor pembangunan yang layak mendapat perhatian serius oleh pemerintah, karena dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sektor ini dinilai cukup berpotensi dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

Landasan bagi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana didalamnya terdapat tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Indonesia dengan system pemerintahan Republik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.² Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah disusun secara bertingkat dimulai oleh Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Kedudukan Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan nasional sebagaimana diatur mulai pasal 18 UUD 1945 adalah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik bidang pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah ditingkat daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi Daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perjalanan sejarah Indonesia telah mengalami beberapa perubahan mengenai konsep pemerintahan daerah, yang dimulai sejak masa Orde Lama. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada 20 Mei 1998 kemudian disusul penyelenggaraan pemilu tahun 1999 maka UUD 1945 yang sebelumnya tidak dapat tersentuh dan tidak dapat diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada 19 Oktober 1999 dimana pada saat itu ada Sembilan pasal yang diamandemen.³

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Ridwan Juniarso dan Sudrajat Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, (Bandung, Nuansa, 2009), hlm. 122.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata Otonomi dan Daerah. Dalam bahasa Yunani, Otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undangan, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.⁴

Sebagai Daerah otonom, suatu Daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung terselenggarakannya Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab serta adanya pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah menyelenggarakan Otonomi daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Ridwan Juniarso dan Sudrajat Achmas Sodik, *Op.Cit.*, hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsekuensi dari Pasal 18 UUD 1945 yang menghendaki adanya pelaksanaan Otonomi Daerah, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintahan di daerah. Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah otonom.⁶ Desentralisasi muncul jika kewenangan yang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga oleh kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri, bersifat Otonom (teritorial maupun fungsional).

Desentralisasi bukan hanya pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan satuan-satuan pemerintahan di tingkat yang lebih rendah. Sistem desentralisasi mengandung makna penentu kebijakan pemerintahan terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan melatih diri menggunakan hak seimbang dengan kewajiban masyarakat demokratis.⁷

Dapat disimpulkan, tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilannya terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan adil dalam hal pendapatan dan terciptanya rasa aman. Selanjutnya otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

⁶ *Ibid.*, hlm. 121.

⁷ *Ibid.*, hlm. 124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan.

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri maka di dalam masyarakat harus tercipta ketertiban umum dengan cara memelihara ketenteramaan. Pemerintahan membentuk perangkat pemerintah daerah yang bertugas untuk menciptakan ketertiban umum dan menjaga ketenteramaan di masyarakat, perangkat pemerintahan itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat dengan (SatpolPP). Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, sedangkan tugas pokoknya adalah pembinaan ketenteraman dan ketertiban, serta penegakkan Peraturan Daerah.

Salah satu daerah otonomi yang diberikan urusan adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlindungan masyarakat (linmas). Linmas telah mengalami distorsi pengertian sehingga terjebak dalam anggapan masyarakat umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yaitu linmas atau lebih dikenal dengan Pertahanan Sipil atau Hansib.

Merujuk kepada pernyataan tersebut maka perlu digali lagi tentang istilah dan pengertian Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (linmas) itu sendiri. Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebagaimana Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam pasal 255 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni:

- 1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁸
- 2) Satuan polisi pamong praja memiliki kewenangan:
 - a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c. Melakukan tindakan penyelenggaraan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.
 - d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci di dalam tugasnya untuk pembinaan ketentraman di masyarakat dibantu oleh Satuan

⁸ Maria G, Rukmana, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Perdagang Kaki Lima Di Kota Semarang*, Jurnal Konstituen, Vol 1 No 2, Juni 2019, hlm. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan masyarakat atau biasa disebut (Satlinmas). Pada Pasal 1 butir 3 yaitu: Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sebagaimana didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang terdapat pada pasal 9, Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas yaitu:

- a. Membantu dalam penanggulangan bencana.
- b. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Membantu dalam sosial kemasyarakatan.
- d. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan
- e. Membantu upaya pertahanan Negara.⁹

Sedangkan fungsi dari Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Membantu memelihara dan meningkatkan kondisi dan tata tertib dikalangan masyarakat.

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Pasal 9.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membantu masyarakat menanggulangi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan dan bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda.
3. Membantu membina masyarakat untuk mempertinggi kesadaran hukum, daya tahan serta daya lawan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi segala macam pelanggaran dan kejahatan.
4. Pembantuan kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pembantuan kepada TNI dalam upaya pertahanan Negara.
6. Pembantuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.

Berkaitan dengan fungsi dalam membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat maka Satlinmas dan hasip menjadi pendukung utama pihak kepolisian atau malah menjadi garda terdepan dalam tata kehidupan masyarakat secara umum baik di desa atau diperkotaan. Sebagai contoh dimana ada keramaian maka dapat dipastikan disitu ada anggota Satlinmas.

Hal ini menyambung dengan pengertian tadi yang ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat. Seorang anggota satlinmas yang notabe bekerja dengan sukarela, rela berkorban untuk begadang beberapa malam manakala mendapat tugas dari pimpinan, biasanya Kepala Desa/Lurah untuk menjaga kegiatan pasar malam, hajatan, Pilkada dan berbagi kegiatan sosial lainnya.

Keanggotaan Satuan Linmas dilakukan melalui pendaftaran secara sukarela dari warga masyarakat dilingkungan pemukiman, pendidikan dan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan / proyek / objek vital yang dilakukan Kepala Desa / Lurah. Syarat untuk menjadi anggota linmas yang terdapat didalam Pasal 4 butir 2 adalah:

- a. warga Negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah.
- e. jenjang pendidikan Minimal STLP dan/atau sederajat.
- f. sehat jasmani dan rohani.
- g. bertempat tinggal diwilayah Desa / Kelurahan setempat dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bidang perlindungan masyarakat yang melakukan pemberdayaan sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat pada Pasal 21 yaitu:

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) pendidikan dan pelatihan; b) peningkatan peranserta dan prakarsa; c) peningkatan kesiapsiagaan; d) penanganan tanggap darurat; e) pengendalian dan operasi; dan f) pembekalan.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, ditemukan fenomena dalam penelitian yaitu:

- a. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota Linmas. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan berupa Bela Diri, Baris Berbaris, Penanganan Bencana Alam, Penanganan Korban Kecelakaan, dan Pelatihan Keadministrasian. Dari pelatihan yang ada, frekuensi pelatihan yang dibutuhkan anggota linmas masih kurang. Dimana pelatihan diberikan saat baru menjadi anggota linmas tidak dilakukan rutin pada setiap bulannya.
- b. Peningkatan kesiapsiagaan belum optimal. Dimana anggota Satpol PP masih menunggu perintah dari atasan untuk melakukan peningkatan kesiapsiagaan. Hal ini sama dengan Penanganan Tanggap Darurat, belum optimal karena masih menunggu perintah dari atasan.
- c. Pengendalian dan operasi belum berjalan efektif. Pengendalian hanya dilakukan saat ada peninjauan lokasi dimana terdapat kasus kerusakan atau kasus yang menyebabkan terjadinya ketertiban masyarakat. Untuk kasus bencana alam yang sering terjadi di Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah Kebakaran, belum ada pengendalian operasi dari linmas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Keberadaan Linmas kurang dilibatkan diberbagi aspek keamanan maupun ketertiban masyarakat dikarenakan anggota Satlinmas tidak digaji/sukarela, seperti yang disebutkan didalam pasal 4 ayat 2 huruf H bahwa: bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Linmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat, sehingga keberadaan Linmas belum terlaksana, sebagaimana tugas dan fungsinya di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Dari fenomena yang diuraikan dapat menjelaskan bahwa Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan sebagaimana mestinya. Tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat belum tercapai .

Berdasarkan permasalahan diatas, hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan judul: **“PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI”** karena satuan kerja ini mendapat mandat untuk membentuk satuan linmas di daerah-daerah agar dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas tentang pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pengendalian dan operasi terhadap kasus kerusakan atau kasus yang menyebabkan terjadinya ketertiban masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014?
2. Apakah faktor penghambat untuk mendapatkan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Menteri Negeri Nomor 84 Tahun 2014?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pengendalian dan operasi terhadap kasus kerusakan atau kasus yang menyebabkan terjadinya ketertiban masyarakat di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat untuk mendapatkan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Manfaat Praktis

Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintahan terkhusus di Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai acuan demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam negeri Nomor 84 tahun 2014, dalam hal pemberdayaan dan perlindungan masyarakat di kecamatan pangkalan kerinci.

c. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat oleh satuan polisi pamong praja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif atau kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.¹⁰

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengaturannya yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰Jonaidi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2018), cetakan 2, hlm. 2.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara lapangan.¹² Jenis penelitian ini juga dapat dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku.

Dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan mengenai mekanisme pemberdayaan perlindungan masyarakat oleh satuan polisi pamong praja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaran perlindungan masyarakat pangkalan kerinci.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹³

¹² Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

¹³ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan pada bidang perlindungan masyarakat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sarana. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.

Objek Penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data lebih jelas atau terarah. Adapun objek dalam penelitian ini ialah Mekanisme Implemtasi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁴

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Satpol PP
- 2) Kepala Bidang Linmas
- 3) Anggota Linmas

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ada.¹⁵ Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purpsive sampling*. *Purprosize sampling* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan katagori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh peneliti untuk mecapai tujuan yang diinginkan penulis. Menurut Arikunto, penentuan pengambilan sampel apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika jumlah subjeknya besar maka dapat diambil antara 10% - 50%.¹⁶

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Satpol PP	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Bidang Linmas	1 orang	1 orang	100%
3	Anggota Linmas	44 orang	15 orang	35%
Jumlah		46 orang	17 orang	100 %

Sumber: Data Olahan, 2020

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang ambil penulis dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm.

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta, Selemba Harmanika, 2010), hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap responden/ informan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu: Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung akan tetapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

¹⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan pengumpulan data dan catatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan panca indralainnya.
- b. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data yang ingin diteliti. Narasumbernya yaitu Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Linmas, Anggota Linmas.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk memberikan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi penelitian untuk mengambil keputusan terhadap pernyataan-pernyataan penelitian. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara untuk menghasilkan penelitian deskriptif, dengan cara menganalisis dan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori dan persamaan jenis data tersebut. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan yang meliputi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan.

Dengan menggunakan metode induktif.¹⁸

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membagikanya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan Dikantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan.

BAB III : TINJAUAN UMUM

Bab ini akan diuraikan beberapa teori, yang terdiri dari tinjauan umum Kantor Satpol PP, teori tentang mekanisme Impelementasi pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat oleh satuan polisi pamong praja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kecamatan pangkalan kerinci.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai mekanisme Implementasi pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat oleh satuan polisi

¹⁸ Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.



pamong praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan apa penghambat untuk mendapatkan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam melindungi masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014.

BAB V : PENUTUP

Buku ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan hasil pemekaran dari Kecamatan Langgam terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 dan pada awal pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Pangkalan Kerinci, Desa Sekijang, Desa Rantau Baru, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur dan Desa Bukit Agung kemudian pada Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 Desa Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi 3 (tiga), Kelurahan: Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, seiring dengan perkembangannya maka pada Tahun 2005 Desa Sekijang dimekarkan menjadi Kecamatan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dan Pangkalan Kerinci sampai saat sekarang wilayahnya terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 4 (empat) Desa.¹⁹

Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Pelalawan terus mengalami perubahan, begitu pula tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten kedua termuda di Propinsi Riau, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tanggal 12 Oktober

¹⁹ *Profil Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 2017.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1999 dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan Wilayah Propinsi Riau.

Kabupaten Pelalawan secara geografis berada pada kordinat $00^{\circ} 46' 24''$ lintang utara sampai dengan $00^{\circ} 24' 34''$ lintas selatan dan $101^{\circ} 30' 37''$ bujur timur sampai dengan 103° bujur timur. Kabupaten Pelalawan dibelah oleh sungai Kampar yang mengalir dari barat ke timur dan bermuara dilautan selatan malaka Kecamatan Kuala Kampar yang memiliki beberapa pulau yang relatif besar antara lain pulau Mendol, pulau serapung dan pulau muda serta pulau-pulau kecil lainnya antara lain pulau untut, pulau tugau, pulau labuh dan pulau ketam.²⁰

Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah $12.647,29 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 12 Kecamatan 104 Desa dan 14 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Inhu
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar/Kuansing
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kabupaten Riau/Kab.Inhil

²⁰ Data diperoleh dari Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 1
Jarak tempuh ibukota Kabupaten Pelalawan ke Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Pelalawan.

No	Kecamatan	Jarak Tempuh (km)	Sarana transportasi
1	Pangkalan Kerinci	0	Darat
2	Langgam	26	Darat
3	Bandar Sekijang	38	Darat
4	Kerumutan	122	Darat
5	Pangkalan Kuras	46	Darat
6	Bunut	68	Darat
7	Badar Petalangan	51	Darat
8	Pangkalan Lesung	72	Darat
9	Ukui	80	Darat
10	Pelalawan	34	darat/sungai
11	Teluk Meranti	136	darat/sungai
12	Kuala Kampar	180	Laut

Sumber: Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

Kondisi daerah yang kondusif memungkinkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur, sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu modal penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “Untuk membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketetraman masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja, Memiliki 2 (dua) peran:

1. Menegakkan Peraturan Daerah
2. Perlindungan Masyarakat
3. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peran pertama berkaitan erat dengan eksistensi Pemerintah Daerah, karena keberadaannya didukung dengan berbagai Peraturan Daerah yang ada. Misalnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu kemampuan daerah juga ditentukan oleh berbagai Peraturan Daerah, seperti peraturan yang mengatur tentang APBD, Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Peraturan Daerah tersebut jelas mempengaruhi kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Peran kedua berkaitan dengan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintahan Kabupaten Pelalawan terhadap pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dari waktu ke waktu, tantangan Satuan Polisi Pamong Praja semakin berat dan kompleks di tengah dinamika sosial yang semakin demokratis dan kritis. Banyaknya produk Peraturan Perundang-undangan Daerah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan Pemerintah Daerah terutama yang mengandung sanksi Hukum Pidana maupun pelanggaran diperlukan penanganan yang serius dalam Penegakan Peraturan Perundangan undangan Daerah dimaksud, antara lain melalui koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparaturnya Penegak hukum lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Pelalawan terutaman dalam Penegakkan Peraturan Perundang undangan Daerah masih terlihat lemahnya kemampuan aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tindakan, sehingga pelanggaran masih sering terjadi yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum maupun kenyamanan masyarakat.²¹

Oleh karena itu gerakan perubahan sosial yang semakin cepat dalam kehidupan masyarakat, diperlukan antisipasi, berupa peningkatan kompetensi dan kapastitas personel dan kelembagaan personel dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu menjawab perubahan-perubahan tersebut, agar benturan dan kerugian sosial yang tidak perlu dapat ditekan sedemikian rupa. Dengan kompetensi dan kemampuan seperti itu diharapkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja semakin profesional, minim kerugian sosial, berhasil sesuai dengan tujuan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta memperoleh dukungan penuh dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan berhubungan langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sesuai dengan wewenangnya berupa pengawasan

²¹ *Ibid.*, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam upaya penciptaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Akan tetapi dalam tugas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan masih terlihat lemahnya kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tindakan. Hal ini terlihat dengan tingginya pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang undangan lainnya, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum maupun kenyamanan masyarakat.

B. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tanggal 1 Desember 2004 adalah merupakan salah satu SKPD dengan Esselonering III pada linkup Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang mengemban tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Seiring dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Daerah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan telah menyesuaikan eselonering bagi penjabat struktural dimana Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabat eselon II sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 10 tahun 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 01 Desember 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.²²

Semakin cepatnya gerak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, diperlukan peningkatan kompetensi dan kapasitas personal dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu menjawab perubahan-perubahan tersebut. Dengan kompetensi dan kemampuan seperti itu diharapkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja semakin profesional sehingga dapat meningkatkan rasa aman, tentram dan tertib pada diri masyarakat. Hal ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pelalawan.

C. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

a. Visi

Visi merupakan gambaran keadaan yang dibayangkan dapat atau ingin dicapai atau diwujudkan dimasa yang akan datang, merupakan cita-cita yang didukung oleh keadaan sekarang dan merupakan arah bagi pengelolaan lembaga. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan menyadari bahwa keberadaan oer organisasi ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) diharapkan dapat memberikan peran nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pelalawan secara umum, maupun terhadap peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan/pedesaan dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pelalawan.

²² *Ibid.*, hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan adalah:

“Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang tentram, tertib, aman, inovasi, guna terwujudnya Pelalawan Emas”

b. Misi

Penyataan misi mengandung secara eksplisit apa yang harus dicapai oleh organisasi dan kegiatan Spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh organisasi untuk mencapai visi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka dirumuskan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Kebudayaan Melayu.
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
3. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
5. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa.
6. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumber Daya Unggulan Daerah Basis Kerakyataan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan.
7. Meciptakan Ketertiban dan Keamanan.²³

²³ *Ibid.*, hlm. 17.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

Secara umum Tugas Polisi Pamong Praja adalah Menegakkan Praturan Daerah, Meyelenggarakan Ketertiban Umum, Memberikan Ketentraman Masyarakat, dan Memberikan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satpol PP Kabupaten Pelalawan Tanggal 01 Desember 2012 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Satuan
2. Unsur Pembantu terdiri dari
 - a) Kepala Sekretaris (Sekretaris)
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian umum dan Kepegawaian
 - b) Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah
 1. Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan penyuluhan
 2. Kasi Penyeliidikan dan Penyidikan
 - c) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Kerjasama
 - d) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
 1. Pelatihan Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teknis dan Fungsional

e) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Linmas

2. Bina Potensi Masyarakat

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

Unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas dan Program Kerja masing-masing, yaitu:

1. Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan desentralisasi, dekosentrasi, tugas pembantu, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang satuan polisi pamong praja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan administrasi umum lainnya.
- b. Penyiapan bahan admistrasi perkantoran, rumah tangga dan perlengkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan hubungan masyarakat masyarakat dan protokol.
- e. Penyiapan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan dibidang ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat/naskah dinas, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
- f. Penyiapan bahan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan.
- g. Pengkoordinasian penyusunan program.
- h. Pengelolaan keuangan.
- i. Pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat, Kepagawaain, perlengkapan rumah tangga dan.
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan perencanaan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Melaksanakan program kegiatan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- e. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- f. Memberi petunjuk dan arahan pada seksi-seksi baik secara lisan maupun tulisan untuk menyelesaikan tugas-tugas di setiap seksi.
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan perencanaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- b. Melaksanakan program kegiatan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
- f. Memberi petunjuk dan arahan pada seksi-seksi baik secara lisan maupun tulisan untuk menyelesaikan tugas-tugas di setiap seksi, dan.
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Sumber Daya Aparatur. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan perencanaan di bidang Sumber Daya Aparatur.
- b. Melaksanakan program kerja di bidang Sumber Daya Aparatur.
- c. Menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan peningkatan kecakapan kemampuan dan profesionalisme personil Satpol PP.
- d. Melaksanakan pembinaan/pengedokan fisik terhadap personil Satpol PP.
- e. Menyusun dan Melaksanakan kegiatan Sumber Daya Aparatur personil yang meliputi pendidikan, pelatihan dan penalaran serta kebutuhan saran dan prasarana.
- f. Memberi petunjuk dan arahan pada seksi-seksi baik secara lisan maupun tulisan untuk menyelesaikan tugas-tugas di setiap seksi, dan.
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kesiagaan, pengerahaan dan pengendalian Satlinmas, menggerakkan semua unsur masyarakat yang dapat dikerahkan dalam rangka bina potensi masyarakat menghadapi bencana, untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Perlindungan Masyarakat.
- b. Perumusan rencana strategi pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan Perlindungan Masyarakat
- c. Penyusunan rencana strategi operasional Perlindungan Masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, PAM Kamtibmas dan PAM Pemilihan Umum.
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
- e. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat.
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala satuan.²⁴

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pengawai Negara Sipil Daerah, dan aparatur lainnya.
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

Tabel II. 2
Struktur Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Abu Bakar. FE, Sos. M.Ap	Kepala Satuan
2.	Drs. Amperadi, M.Si	Sekretaris
3.	Dediyana Febri, SE	Sub Bagian Program
4.	Jusnimarlina, SE	Sub Bagian Keuangan
5.	Ritualis, S,pd	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
6.	Ahmad Fauzi Nasution, S.Pd	Bidang Operasional Tratibum
7.	Zulherman, AR, S. Sos	Seksi Pengendalian Penerbitan
8.	Rospandi, S. Sos	Seksi Pengendalian Pengamanan Dan Pengawasan
9.	Popo Syamputra, ST	Seksi Intelejen
10.	Abizar, S.Sos, M.Si	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
11.	Ariadi I.A.M, SH	Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan
12.	Jumperi, S. AP	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
13.	Ahmad Suhil, SJ, MH	Seksi Hubungan Antar Lembaga
14.	Suryono, S.Sos	Bidang Pembinaan Satuan Linmas
15.	Ahmadi, S.Sos	Seksi Pelatihan Dan Mobilisasi
16.	Syahrizal, S.Sos	Seksi Bina Potensi Masyarakat
17.	Suyatno	Seksi Data Informasi Dan Sarana Prasarana
18.	Taswir, S. Sos	Bidang Pemadam Kebakaran
19.	Zukriwa, S	Seksi Operasional Pemadam
20.	Elva Fahsah, S,Hut	Seksi Pencegahan Kebakaran
21.	Yanda, S.Sos	Seksi Sarana Dan Prasarana Damkar

Sumber: Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III TINJAUAN UMUM

A Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan “Power”. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau *empowerment*, karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan dan memampukan yang lemah.

Pemberdayaan merupakan merupakan konsep yang muncul sebagai dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat barat, terutamanya Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan lahirnya aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang neoMarxisme, freudianisme, strukturalisme, dan sosiologi kritik Frankfurt School.

Bersamaan dengan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan civil society. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran yang muncul pada paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur dan anti-determinisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Sementara secara terminologi pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) mulai

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipopulerkan di Indonesia sejak tahun 1980-an. Pada mulanya dikenal dengan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga non pemerintah (NGO), namun kini telah menjadi konsep pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Hampir semua departemen/lembaga pemerintahan non departemen memiliki program pemberdayaan masyarakat dan konsep dengan “isu” memberdayakan masyarakat yang dicantumkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Hal seperti ini juga berlaku di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Namun demikian, dengan tafsir yang berbeda terhadap konsep pemberdayaan, pelaksanaan program pemberdayaan telah melumpuhkan masyarakat menjadi lebih tak berdaya untuk mandiri, artinya program pemberdayaan lebih menambah tingkat ketergantungan masyarakat pada bantuan pihak lain.²⁵

Menurut Priyomo, S. Onny dan Pranarka, pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidup. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses atau tujuan. Sebagai proses memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat dan kelompok serta individu

²⁵ Saifuddin Yunus, dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Aceh, Bandar Publishing, 2017), hlm. 1-2.

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial.

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mentranfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir.

Menurut Arbi Sanit pemberdayaan adalah upaya mentransportasikan segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan mereka dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, penguatan ekonomi dipandang sebagai langkah awal atau dasar, disamping pematangan budaya dan pematangan agama untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta penguatan posisi tawar masyarakat ketika berhadapan dengan kekuatan negara.

Menurut Basyid, pemberdayaan masyarakat tidak saja dilakukan melalui pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung mendukung proses perubahan tersebut maka peranan pemerintah dapat dilakukan antara lain melalui: (1) penyediaan sarana prasarana fisik, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian dan lingkungan usaha. (2) Fasilitasi percepatan perkembangan di wilayah pedesaan. (3) Fasilitas pembentukan iklim yang kondusif bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta investasi. (4)
Penerapan berbagi pola pemberdayaan masyarakat petani.

Menurut Burhan, pemberdayaan petani dilakukan dengan cara memposisikan para petani sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan. Untuk itu, pendekatan dapat dilakukan secara partisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas dalam merumuskan program, pendekatan dengan mempertimbangkan kondisi sosial kultural masyarakat, dan menggunakan agen pembaharu dan tenaga pendamping.

Sedangkan menurut Kartasasmita, menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga prantara-prantarnya. Dari pengertian diatas yang dikaitkan dengan pemberdayaan dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah tindakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian yang dimulai penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat menjadi berkembang.²⁶

Adapun tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.

²⁶ Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*, (Bandung, Unpad Press, 2006), hlm.53.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
3. Perbaikan pendidikan (*better action*) dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.
5. Perbaikan usaha (*better business*) dengan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Perbaikan lingkungan (*better enviroment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
8. Perbaikan kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat meperbaiki keadaan hidup setiap keluarga dan masyarakat.
9. Perbaikan masyarakat (*better community*) keadaan hidup yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.²⁷

B. Teori Kebijakan Publik

Penggunaan bahasa kebijakan seringkali dikaitkan dengan bahasa kebijaksanaan. Kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti dan makna yang tersendiri dalam arti konteks maupun dalam kontennya. Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan kebijaksanaan adalah alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor lainnya untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang terhadap proses kebijaksanaan yang dilakukan.

Keduanya mempunyai pola tersendiri dalam proses, pelaksanaan dan evaluasinya sehingga harus dibedakan penggunaannya. Smith dan Larimer di dalam bukunya yang berjudul: "*The Public Policy Theory Primer*"

²⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengemukakan tentang berbagi pendapat tentang kebijakan. *Policy is whatever governments choose to do or not to do* (Kebijakan itu menurut Dye adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah). Dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan publik. Apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan publik atau masyarakat adalah bagian dari kebijakan publik.

Eyestone mengemukakan bahwa kebijakan adalah *the relationship of governmental unit to its environment* (Hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam rangka pemerintahan). Hubungan antara unit-unit dengan lembaga pemerintahan adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara *top-down*. Setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan, baik secara kelembagaan ataupun personal. Kebijakan itu berbentuk korelasi antara unsur dan lembaga.

Sementara itu menurut Wilson mengemukakan bahwa kebijakan itu *action, objective and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)* (atau tindakan, objektif dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil atau gagal dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi).²⁸

²⁸ Hayat, *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi*, (Malang :Intrans Publishing, 2018), hlm. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat dan warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetensi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.²⁹

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.³⁰

Easton memberikan defenisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-

²⁹ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 32.

³⁰ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Pers, 2014), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai projected program of goal, value, and partice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefenisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.³¹

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefenisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan liingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa defenisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- 2) Kebijakan publik merupakan suatu yang mudah diukur, karena ukurannya jenis yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita suatu ditempuh.

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

³¹ Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Reponsif*, (Bandung: Hakim Publishing, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ricard Rose kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan berserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan ini dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Defenisi ini dapat diklasifikasikan sebagai investasi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik, karena melalui hal tersebut akan terjadi perdebatan antara yang setuju dengan tidak setuju terhadap suatu hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).³²

Dalam kaitanya dengan defenisi-defenisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu defenisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang

³² Abdal, *Kebijakan Publik Memahami Konsep Kebijakan Publik*, (Bandung: Grafindo, 2005), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.

Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

C. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja atau sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP, Secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP dalam Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu, dalam pasal 1 ayat (7) Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satuan Polisi Pamong Praja juga menyebutkan hal yang sama mengenai pengertian Satpol PP berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2010. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Praja menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur pemerintahan daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.³³

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (PERDA) dan/atau peraturan kepala daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang menggunakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitass dan pemberdayaan kapasitasis penyelenggaran perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (PERDA) dan/atau peraturan kepala, daerah dan.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (PERDA) dan/atau peraturan kepala daerah.³⁴

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat 8

³⁴ Elza Syafier, DKK, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah*, Journal Of Judicial Review, Vol. XVI, No.1, Juni 2014, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Pada pasal 1 butir 3 dan 4 yaitu: “Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibuat oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.”³⁵

Secara historis Satuan Perlindungan Masyarakat tugas hansip. Pada awalnya Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan tanggung jawab dan tugas pokok dari lembaga pertahanan negara yang disebut dengan hansip atau pertahanan sipil. Karena terjadinya reformasi sehingga berpengaruh terhadap beberapa peraturan tentang fungsi Linmas sehingga keseluruhan tugas dari Linmas diserahkan kepada Satpol PP. yang mendasari peraturan atau penegakkan Satpol PP adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2010 Pasal 4 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Satpol PP mempunyai wewenang yang tercantum pada Pasal 6 Polisi Pamong Praja berwenang:

³⁵ Azhim Rohman, DKK, *Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas) Dalam Penanggulangan Bencana*, Jurnal Respon Publik, Vol. 13, No. 6, 2019, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan penindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan pelanggaran administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.³⁶

Melihat kesamaan tugas dan fungsi Satpol PP dengan Linmas, maka pada tahun 2013, dilakukan penggabungan Linmas kedalam Satpol PP berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 341/290/Sj tertanggal 23 Januari 2013 Tentang Penggabungan Linmas kedalam SKPD Satpol PP, dengan penggabungan ini, maka Linmas berada dalam Satpol PP.

D Teori Keamanan Dalam Masyarakat

Dalam kehidupan suatu negara, aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu memperthankan diri terhadap ancaman dari luar

³⁶ Sunyoto Usman, *Modal Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018), hlm. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri serta tanpa mampu menjamin keamanan terhadap ancaman dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat memperthankan hidupnya.³⁷

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berkeuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari luar negeri maupun dalam bentuk apapun, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mencapai tujuan perjuangan nasionalnya.³⁸

Dalam konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suatu suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan – sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Tiga ciri dari pengertian tradisional tersebut : *pertama*, Identifikasi “nasional” sebagai “negara”; *kedua*, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara; dan, *ketiga*, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Tak heran Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan, bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun ketentuan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan.

Dalam konteks seperti itu, walaupun keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai “keamanan negara” dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya – maka ia perlu mengandung

³⁷ A. Chalik Ali, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara dan Proses Pembentukannya*, (Bandung :Grafindo, 1983), hlm. 33.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikit-dikitnya tiga komponen : kedaulatan wilayah, lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya ; dan terjaminan keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.³⁹

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat ditetapkan, Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap bentuk ancaman dari luar negeri dan dari dalam negeri pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara.

Pengertian keamanan dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.⁴⁰ Secara umum, pengertian keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Keamanan dalam negeri Indonesia diserahkan kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI). Dalam pelaksanaan keamanan sebagai wujud pertahanan nasional, dilandasi dengan landasan ideal Pancasila dan landasan Konstitusional UUD 1945.

³⁹ Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Keetertiban Umum*, (Depasar : Departemen Kehakiman RI, 2003), hlm,1.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konsep klasik, keamanan lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dengan ancaman yang muncul dari luar. Konflik antar negara khususnya dalam upaya memperluas imperium daerah jajahan membawa definisi security hanya ditujukan kepada bagaimana negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Dalam pendekatan tradisional, negara (state) menjadi subyek dan obyek upaya mengejar kepentingan keamanan.

Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara.⁴¹ Idealis tentang Keamanan Nasional Indonesia, telah diamanatkan oleh para *founding fathers* dan disuratkan ke dalam kalimat “melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”.

Idealisme ini sangat luas karena melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mencakup:

1. Perlindungan terhadap Warga Negara;
2. Perlindungan terhadap Masyarakat ;
3. Perlindungan terhadap Negara.

Ruang gerak Keamanan Nasional Indonesia yang digagas oleh para *founding fathers* pada hakikatnya sudah mencerminkan keamanan komprehensif yang saat telah menggelabal.⁴²

⁴¹ Heru Susetyo, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, Lex Jurnalica, edisi 1 Vol. 6, Universitas Indonesia, 2008 hlm. 2.

⁴² Kusnanto Anggoro, *Op. Cit.*, hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia sendiri Konsepsi keamanan paling tidak mengetahui Doktrin dan Perundangan yang dilandaskan. Dalam doktrin sendiri salah satu yang diutamakan adalah Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun luar, secara langsung maupun tidak secara langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Ketahanan nasional mencakup organisasi dan implementasi dari suatu keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan bangsa, yang secara holistik meliputi semua aspek yang berlandaskan filosofi bangsa, ideologi negara, konstitusi dan identitas nasional melalui metode ASTAGATRA.⁴³

Doktrin ketahanan nasional lebih memandang ke dalam atau tertuju pada bangsa Indonesia sendiri. Tujuan utamanya adalah pencapaian identitas dan karakter nasional melalui ketahanan pribadi. Dari sisi Perundangan, Konsepsi Keamanan Indonesia dapat dilihat dari 3 peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan bentuk peraturan perundangan yang dijadikan landasan oleh Konsepsi Keamanan Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴³ Heru Susetyo, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 ini berbunyi Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang ini Keamanan adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menagkal, mencegah dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁴⁴

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pada Pasal 1 ayat (1) Perahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang ini pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat sementara yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional, serta dipersipkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan rakyat, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 1 ayat (5) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara disusun dengan mempertahankan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurut Undang-Undang ini tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁴⁶

Dapat disimpulkan dari Konsepsi Keamanan Nasional diatas Keamanan selain sebagai suatu kondisi, juga merupakan fungsi yang memberikan perlindungan dan keamanan pada masyarakat dengan kata lain keamanan merupakan salah satu wujud pelayanan dari negara kepada warga negara dan masyarakat, atau yang sering dikenal dengan istilah Pelayanan Publik.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian tentang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci belum dapat sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan tersebut. Di karenakan kondisi dimana masih adanya hambatan berupa anggaran yang menjadi bahan dasar operasional dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
2. Faktor penghambat dalam Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah:
 - a. Faktor kurangnya sosialisasi pemerintah kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat maupun masyarakat terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

- c. Faktor terbatas penyelenggaraan anggaran dana kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, dan
- d. Faktor kurangnya pendidikan dan pelatihan kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

B. Saran

Untuk bisa diterapkan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2014 ini. Seharusnya menjadi acuan agar pemerintah pusat dapat memaksimalkan perlindungan masyarakat dengan perpanjangan tangan ke daerah, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat menambah Anggaran sendiri untuk operasional Perlindungan Masyarakat pada Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa agar pelaksanaan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat dapat maksimal dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dari anggota Satuan Perlindungan Masyarakat menjalankan tugas.
2. Kepada masyarakat untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri agar Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asdal, *Keibijakan Publik Memahami Konsep Kebijakan Publik*, (Bandung : Grafindo, 2015)
- Chalik Ali, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Keamanan Negara dan Proses Pembentukanya*, (Bandung : Grafindo, 1983)
- Awan Y. Abdoellah, Rusfiana, *Teori dan Analisi Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2011)
- Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2018)
- Kusnanto Anggoro, *Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Ketertiban Umum*, (Denpasar : Depatermen Kehakiman, 2003)
- Rahmad Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembagunan*, (Bandung: Unpad Pess, 2016)
- Rawan Juniarso, Sudrajat Ahmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, (Bandung, Nuansa, 2009)
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Safuddin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998)
- Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sujiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif da R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Smyoto Usman, *Modal Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018)
- Syauddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jurnal

Amin Rohman, dkk, *Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana*, Jurnal Respon Publik, Vol. 13, No. 6, 2019.

Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung : Hakim Publishing, 2013.

Elsa Syafier, dkk, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah*. Journal Review, Vol. XVI, No. 1, Juni, 2014.

Hayat, *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi*, Malang : Intrans Publishing, 2018.

Heru Susetyo, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*. Lex Jurnalica, edisi 1 Vol. 6, Universitas Indonesia, 2008.

Maria G, Rukmana, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang*, Jurnal Konstituen, Vol 1 No. 2, Juni.

Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal ilmiah Civis, Volume 1, No. 2 Juli 2011.

Saifuddin Yunus, dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Aceh : Bandar Publishing, 2017.

Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian, Tanggung Jawab Presiden Selaku Penyelenggaraan Pemerintah*, Jakarta : Pers, 2014.

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tetang Pemerintah Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI"* yang ditulis oleh :

Nama : ISNAN RASYIDI
 NIM : 11727109009
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Hermawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
 Jumi Alizon, SH., MH

Penguji I
 Nurhidayat, SH., MH

Penguji II
 Safrinaldi, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jahinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 April 2021

Undang/F.I/PP.00.9/3314/2021

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ISNAN RASYIDI
NIM	: 11727100909
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1005

© Hak Cipta Ditamalkan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Ditamalkan Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/40561
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.SUSKA.RIAU/SP.00.9/314/2021 Tanggal 6 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

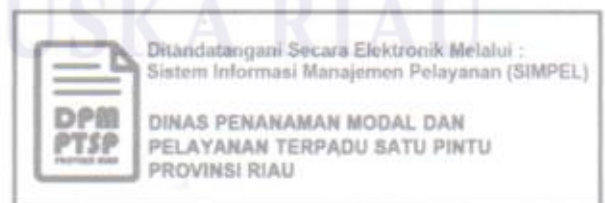
Nama	: ISNAN RASYIDI
NIM / KIP	: 11727100909
Program Studi	: ILMU HUKUM
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
Lokasi Penelitian	: KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 April 2021



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Usaha Ransas dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
 Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
 PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI
 Nomor : 504/DPMPTSP/2021/0122

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari UIN SUSKA RIAU Nomor : 03/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40561 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

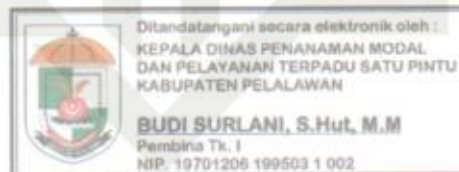
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ISNAN RASYIDI |
| 2. NIM / KTP | : 11727100909 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jurusan | : S1 |
| 5. Alamat | : JL. RAJA |
| 6. Judul Penelitian | : PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
 Pada tanggal 14 Juli 2021



Tembusan :

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA
JL. PAMONG PRAJA NO. 01 PANGKALAN KERINCI 28381
Email : Polpp.pelalawan@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 331.1/Satpol.PP/IV/2021/202

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROVINSI RIAU Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISE/40561 Tanggal 7 April 2021, perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : ISNAN RASYIDI

NIM : 1774201005

Program Studi : ILMU HUKUM

Jenjang : S1

Alamat : PEKANBARU

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset/Pra Riset di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan dengan judul skripsi :

"PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI"

Demikian Surat Keterangan Riset/Pra Riset Penelitian ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 22 April 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PELALAWAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Logo Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ISNAN RASYIDI

NIM : 11727100909

Program Studi: ILMU HUKUM

Judul : *Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci*

Pembimbing : Muslim S.Ag, SH, M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pangkalan Bunut yang terletak di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, pada tanggal 07 November 1999 dari pasangan suami istri Bapak Taswir dengan Ibunda Zetrawilis yang diberi nama **“ISNAN RASYIDI”** yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Riwayat pendidikan penulis, pada tahun 2011 penulis lulus dari Sekolah Dasar 007 Pangkalan Kerinci. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di MTS Dar El Hikmah Pekanbaru, dan pada tahun 2017 Penulis lulus dari Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa UIN SUSKA RIAU, penulis juga mengikuti organisasi Rohis Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II. Setelah itu penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN DR) di Desa Sering Kecamatan Pelalawan. Pada tanggal 28 Juli 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

UIN SUSKA RIAU